

DIFERENSI SOSIAL DALAM MASYARAKAT: KAJIAN TERHADAP BENTUK DAN DAMPAKNYA TERHADAP INTERAKSI SOSIAL

Muhammad Adafi Al Akbar

Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri
Ali Rahmatullah Tulungagung Indonesia
alakbardafi@gmail.com

ABSTRAK

Keanekaragaman sosial merupakan karakter utama masyarakat Indonesia yang majemuk. Diferensiasi sosial sebagai wujud perbedaan horizontal menjadi dasar dari pluralitas masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan profesi. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk diferensiasi sosial serta mengevaluasi dampaknya terhadap pola interaksi sosial, baik yang bersifat integratif maupun disintegratif. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah pustaka dari berbagai sumber ilmiah dan kajian empiris. Hasil analisis menunjukkan bahwa diferensiasi sosial dapat memperkaya struktur sosial dan memperkuat solidaritas apabila dikelola secara adil, setara, dan inklusif. Namun, apabila tidak disertai dengan toleransi dan pengakuan terhadap hak-hak sosial budaya, diferensiasi ini berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok. Oleh karena itu, pemahaman kritis dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan sangat diperlukan untuk memperkuat kohesi sosial.

Kata Kunci: Diferensiasi sosial, Pluralitas, Identitas sosial, Integrasi sosial, Konflik horizontal

ABSTRACT

Social diversity is the main characteristic of a pluralistic Indonesian society. Social differentiation as a form of horizontal difference is the basis of the plurality of society consisting of various racial, ethnic, religious, gender, and professional groups. This study aims to identify forms of social differentiation and evaluate their impact on social interaction patterns, both integrative and disintegrative. The study was conducted using a descriptive qualitative approach through a literature review of various scientific sources and empirical studies. The results of the analysis show that social differentiation can enrich social structures and strengthen solidarity if managed fairly, equally, and inclusively. However, if not accompanied by tolerance and recognition of sociocultural rights, this differentiation has the potential to cause conflict between groups. Therefore, critical understanding and policies that support equality are needed to strengthen social cohesion.

Keywords: *Social differentiation, Plurality, Social identity, Social integration, Horizontal conflict*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dikenal luas karena keberagaman etnis, budaya, dan bahasa yang dimilikinya. Tidak kurang dari 1.300 kelompok etnis hidup berdampingan, (Heru, 2021) masing-masing membawa tradisi, sistem nilai, dan struktur sosial yang berbeda. (Gugus, 2024) Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia

sebagai medan yang sangat kaya untuk mengamati fenomena diferensiasi sosial dalam praktiknya. Diferensiasi sosial dalam konteks ini menjadi suatu keniscayaan dan bagian dari karakter bangsa.

Konsep diferensiasi sosial dalam sosiologi mengacu pada pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan-perbedaan yang tidak bersifat hirarkis. Artinya, perbedaan tersebut

tidak menunjukkan superioritas atau inferioritas satu kelompok terhadap kelompok lain, melainkan memperlihatkan keragaman yang bersifat sejajar. Aspek-aspek seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan profesi menjadi dasar pengelompokan ini. Walaupun tidak bersifat hirarkis secara teori, dalam praktik sosial sering kali diferensiasi sosial menimbulkan stereotip dan perlakuan yang timpang.

Keberagaman yang ada semestinya menjadi kekuatan sosial, (Imam, 2024) menjadi landasan integrasi dan kohesi sosial yang kokoh. Namun pada kenyataannya, sejarah sosial Indonesia diwarnai berbagai konflik yang berpangkal pada perbedaan identitas. Peristiwa-peristiwa seperti kerusuhan etnis di Kalimantan Barat dan Poso, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu menunjukkan bahwa diferensiasi sosial memerlukan pengelolaan yang cermat dan sensitif terhadap nilai keadilan sosial. (Heru, 2021) (Lukman, 2024)

Dalam konteks masyarakat modern, tantangan diferensiasi sosial tidak hanya berasal dari perbedaan yang bersifat tradisional, tetapi juga dari kemunculan identitas-identitas baru yang dibentuk oleh globalisasi, media, dan perkembangan ekonomi. (Sri, 2024) Hal ini memperkaya tetapi sekaligus memperumit pola interaksi sosial. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan diferensiasi secara adil dan setara menjadi semakin mendesak untuk menjamin keberlangsungan sosial yang damai dan produktif. (Almas, 2024)

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia serta mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya terhadap pola interaksi sosial. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi

konseptual dan praktis bagi penguatan integrasi sosial dan penanggulangan konflik berbasis identitas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis dokumen berupa buku-buku sosiologi, artikel jurnal ilmiah, laporan riset sosial, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema diferensiasi sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keanekaragaman Sosial

Keanekaragaman sosial adalah napas kehidupan masyarakat Indonesia yang terbentuk dari perjalanan sejarah panjang dari migrasi, kolonialisme, interaksi budaya, hingga pembangunan yang timpang. Dalam kerangka itu, diferensiasi sosial hadir bukan sebagai bentuk ketimpangan, melainkan sebagai realitas sosial yang mencerminkan perbedaan tanpa hirarki. Ia memetakan kelompok sosial berdasarkan ras, agama, etnis, gender, maupun profesi, dengan semangat kesetaraan. (Tifani, 2025)

Dalam sosiologi, diferensiasi sosial dipahami sebagai bentuk pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan karakteristik yang tidak menciptakan hierarki kekuasaan. (Santi, 2025). Artinya, tidak ada kelompok yang secara struktural lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain, seperti halnya dalam stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial bersifat horizontal, dan justru menjadi fondasi bagi keragaman fungsi sosial. Setiap kelompok memiliki posisi sejajar dalam masyarakat, dengan tugas dan kontribusi masing-masing dalam mendukung sistem sosial yang kompleks. (Syafii, 2025)

Penting untuk menegaskan bahwa diferensiasi sosial tidak identik dengan konflik atau ketimpangan. Ia adalah suatu keniscayaan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, yang terbangun dari puluhan bahkan ratusan kelompok sosial. Masalah muncul bukan dari keberadaan perbedaan itu sendiri, tetapi dari bagaimana perbedaan tersebut dipahami, diperlakukan, dan dikelola. Ketika diferensiasi dianggap sebagai ancaman atau dimanipulasi untuk kepentingan sempit, maka yang muncul adalah fragmentasi sosial dan eksklusif.

Diferensiasi sosial juga berfungsi sebagai mekanisme identifikasi sosial. Individu mengenali dirinya dan orang lain melalui kategori sosial tertentu seperti etnis, agama, atau profesi yang pada dasarnya netral. Namun, proses identifikasi ini bisa menjadi eksklusif bila tidak disertai dengan kesadaran multikultural. Dalam konteks ini, pendidikan nilai menjadi penting agar diferensiasi tidak berkembang menjadi stereotip negatif atau prasangka kolektif. (Rosichin, 2024).

Lebih jauh lagi, dalam masyarakat modern, diferensiasi sosial mendukung pembagian kerja yang efisien. Seorang guru, petani, pemuka agama, dan teknokrat memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Dalam hal ini, diferensiasi memperlihatkan fungsionalitas sosial yang mendorong keteraturan dan integrasi. Masalah timbul ketika penghargaan terhadap peran-peran tersebut tidak seimbang, atau ketika distribusi sumber daya lebih condong ke kelompok tertentu, sehingga memicu kecemburuan dan ketegangan sosial. (Sahlan 2025)

Pengelolaan diferensiasi sosial menuntut pendekatan lintas bidang: hukum, pendidikan, ekonomi, dan budaya harus saling menguatkan. Negara tidak cukup hanya mengakui keberagaman secara normatif, tetapi harus aktif melindungi hak-hak kelompok yang berbeda

untuk menjalankan identitas sosial mereka. Perlindungan terhadap diferensiasi sosial bukanlah pemberian istimewa, melainkan wujud dari keadilan sosial yang substantif. (Khoris, 2025)

Salah satu bentuk diferensiasi yang paling sensitif adalah ras. Meskipun secara konstitusional semua warga negara dipandang setara, (Diya, 2022) realitas masih menunjukkan adanya perlakuan berbeda, terutama terhadap masyarakat Papua atau keturunan Tionghoa. (Nurjaman, 2021) Diskriminasi dalam bentuk stereotip, akses ekonomi yang timpang, hingga keterbatasan representasi politik masih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. (Jerry Indrawan, 2022)

Dalam keseharian, etnis atau suku bangsa menjadi pembeda paling tampak. Keberagaman bahasa, adat, dan nilai menjadikan Indonesia sebagai negeri kaya budaya. Namun, dalam konteks tertentu, identitas etnis dapat digunakan sebagai alat politik. Konflik sosial seperti di Sambas, Sampit, dan Poso menunjukkan bagaimana diferensiasi etnis bisa menjadi pemicu kekerasan ketika dipadukan dengan ketimpangan ekonomi dan perebutan kekuasaan.

3.2 Agama dan Struktur Sosial

Agama juga memegang peranan penting dalam struktur sosial. Meski secara formal negara mengakui enam agama, dan berbagai kepercayaan lokal, tantangan dalam praktik keberagamaan tetap terjadi, terutama pada kelompok minoritas. Kasus penolakan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, dan ujaran kebencian menjadi cerminan bahwa toleransi masih harus diperjuangkan bersama. (Aden Rosadi, 2024).

Berikut adalah ilustrasi tantangan yang dihadapi kelompok minoritas agama:

Aspek	Tantangan Umum	Contoh Kasus
Rumah Ibadah	Penolakan pendirian	Gereja Yasmin, Bogor (Reyni, 2025)
Ibadah	Pelanggaran kegiatan	Jemaat Ahmadiyah, Lombok
Represantasi	Kurangnya ruang di lembaga negara	Perwakilan minoritas dalam DPR (Artha, 2023)

Perbedaan gender pun memainkan peran dalam diferensiasi sosial. (Hodriani, 2023) Dalam masyarakat yang masih patriarkal, laki-laki cenderung mendapatkan ruang lebih luas di ranah publik, sementara perempuan masih dibatasi pada peran domestik. Ketimpangan ini berpengaruh pada akses pendidikan, peluang kerja, dan keterlibatan politik perempuan. Meski upaya afirmatif telah dilakukan, norma budaya yang konservatif sering kali menjadi hambatan perubahan.

Dalam dunia kerja, diferensiasi berdasarkan profesi mencerminkan bagaimana masyarakat memandang pekerjaan tertentu lebih bernilai. Profesi seperti dokter, pengacara, atau pejabat negara sering kali dianggap lebih tinggi dibanding petani atau nelayan. Penilaian ini, meskipun tidak selalu diucapkan, menciptakan jarak simbolik yang melemahkan rasa solidaritas sosial. (Erningsih, 2024)

Namun tidak semua perbedaan harus berujung pada ketimpangan. Dalam masyarakat yang sehat dan demokratis, diferensiasi justru menjadi fondasi bagi pembagian kerja dan spesialisasi yang efisien. Setiap kelompok memiliki peran dan

kontribusinya sendiri, asalkan dijalankan dalam semangat saling menghormati dan kesetaraan kesempatan.

Kendati demikian, praktik-praktik eksklusif dalam kehidupan sosial masih sering terjadi. Ketika kelompok dominan menonjolkan identitasnya untuk meminggirkan kelompok lain, diskriminasi struktural muncul. Polarisasi makin tajam, apalagi jika diperkuat oleh konten media sosial yang menyebarkan prasangka dan kebencian berbasis SARA. (Rinaldi, 2024) Politisasi identitas pun turut memperumit situasi. Dalam momentum politik seperti pemilu, isu agama atau etnis kerap diangkat demi meraih suara. Strategi semacam ini tidak hanya membahayakan etika demokrasi, tetapi juga menanamkan luka sosial yang dalam dan berjangka panjang.

Di tengah dinamika tersebut, pendidikan multikultural menjadi jawaban strategis. Lewat pendekatan ini, generasi muda diajak untuk memahami, menghargai, dan merayakan perbedaan. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga ruang pembelajaran sosial untuk membentuk generasi yang inklusif dan penuh empati. Media massa pun tak kalah penting dalam membentuk kesadaran kolektif. Media yang berpihak pada nilai keberagaman dapat menjadi penggerak perubahan sosial. Namun, kenyataannya, media sering memperkuat stereotip dan bias. Oleh karena itu, literasi digital harus ditanamkan secara sistematis agar masyarakat dapat memilah informasi secara kritis. (Zulfadli, 2022)

Negara memegang tanggung jawab besar dalam mengelola keberagaman. Melalui kebijakan afirmatif, perlindungan hukum, dan pemerataan distribusi sumber daya, negara harus hadir secara aktif. Tanpa komitmen dan keberpihakan terhadap keadilan, diferensiasi sosial akan bertransformasi menjadi sumber ketimpangan yang kronis. (Hilmin, 2023)

Kolaborasi antar elemen bangsa menjadi kunci utama perubahan. Pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, hingga pemuda perlu bersinergi dalam menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka. Forum lintas iman, festival budaya, serta kampanye sosial adalah contoh nyata inisiatif membangun kohesi. (Wahyudi, 2025)

Pembangunan ekonomi yang inklusif juga tak dapat dipisahkan dari agenda pengelolaan diferensiasi sosial. Ketimpangan ekonomi adalah akar dari banyak konflik yang terjadi. Maka, pemberdayaan berbasis komunitas, dukungan terhadap UMKM, dan pembangunan wilayah marjinal adalah langkah konkret memperkuat integrasi sosial. (Ririn, 2025). Pada akhirnya, diferensiasi sosial bukanlah ancaman, melainkan realitas yang perlu diakui dan dikelola secara bijaksana. Tantangan terbesar bukan terletak pada keberagaman itu sendiri, tetapi pada sikap kita terhadapnya. Jika ditangani dengan prinsip keadilan dan kebersamaan, keberagaman justru akan menjadi kekuatan kolektif menuju masyarakat yang lebih adil dan damai.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Keanekaragaman sosial dalam masyarakat Indonesia merupakan manifestasi dari dinamika sejarah, geografis, dan budaya yang kompleks. Diferensiasi sosial, sebagai bentuk pengelompokan horizontal atas dasar ras, etnis, agama, gender, dan profesi, merepresentasikan struktur sosial yang tidak bersifat hierarkis namun memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Dalam kerangka negara-bangsa yang plural, pengakuan atas diferensiasi ini merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Berbagai bentuk diferensiasi sosial yang teridentifikasi, seperti rasialisme,

etnosentrisme, diskriminasi berbasis agama, ketimpangan gender, serta stratifikasi profesi, menunjukkan bahwa perbedaan sosial bukan sekadar entitas simbolik, tetapi juga dapat berdampak nyata pada relasi kuasa dan distribusi akses terhadap sumber daya. Di Indonesia, realitas tersebut tampak dalam kasus-kasus marginalisasi kelompok minoritas, keterbatasan representasi, dan munculnya konflik horizontal berbasis identitas.

Dampak dari diferensiasi sosial terhadap interaksi sosial bersifat dualistik. Di satu sisi, ia berpotensi menjadi sumber integrasi sosial, apabila dikelola secara adil dalam konteks pengakuan, partisipasi, dan redistribusi. Namun, di sisi lain, apabila pengelolaan diferensiasi dilakukan secara eksklusif dan hegemonik, maka perbedaan akan mengalami reduksi menjadi segregasi, bahkan antagonisme sosial yang berujung pada disintegrasi.

4.2 Saran

Strategi penguatan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk menuntut pendekatan multidimensional. Pendidikan multikultural perlu diposisikan sebagai pilar utama dalam membangun kesadaran kolektif mengenai nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan keadilan. Peran media massa pun harus direorientasi agar menjadi agen perubahan yang berpihak pada narasi inklusi, bukan memperkuat stereotip dan prasangka sosial.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral dalam menjamin perlindungan atas hak-hak kelompok sosial yang terdiferensiasi. Implementasi kebijakan afirmatif, pemenuhan hak sipil dan politik, serta pemerataan pembangunan menjadi imperatif untuk mewujudkan keadilan sosial. Tanpa keberpihakan struktural dan regulatif dari negara, diferensiasi sosial berisiko

berkembang menjadi bentuk ketimpangan sistemik yang menghambat integrasi nasional.

Dengan demikian, diferensiasi sosial bukanlah hambatan, melainkan sumberdaya sosial yang dapat diolah menjadi kekuatan kolektif. Kunci utama terletak pada keberanian politik, kesadaran kritis masyarakat, dan kemauan institusional untuk menjadikan keberagaman sebagai basis etis dalam membangun peradaban yang adil, setara, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Neviari. Reyni Bening. "Dinamika Aktor dalam Politik Penutupan Rumah Ibadah Studi Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor Tahun 2006 – 2022" *Socio – POLITICAL Communication and Policy Review*. Vol. 2., No. 1, 2025.
- Indriyani. Ririn dan Deko Rio Putra. "Revitalisasi Nilai Toleransi Islam dalam Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia Studi Kasus Pendekatan Wali Songo" *Yayasan Darussalam Bengkulu*. Vol. 6., No. 2, 2025.
- Tifani. Alzahra, Selly Maharani, Rendi Ramadan. "Opini Publik dan Isu Identitas: Etnis, Gender, dan Agama" *Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 2., No. 1, 2025.
- Sahlan. "Analisis Peran Pendidikan Dalam Mengubah Statifikasi Sosial" *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5., No. 1, 2025.
- Pujianto. Khor, Titis Tata, dkk. "Inovasi Tanpa Batas: Kolaborasi Perempuan Wirausaha Dalam Menciptakan Produk dan Jasa Baru Pada Era Teknologi 5.0" *Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JISE)*. Vol. 3., No. 1, 2025.
- Rosadi. Adi, Ahmad Sarbini, Mustofa. "Kilai dan Moderasi Beragama: Peran serta Pengaruhnya pada Masyarakat Perdesaan" *Bandung: Gunung Djati Publishihng*, 2024.
- Erningsih, Sri Ramadani, dkk. "Pengantar Sosiologi Kontemporer" *Padang: CV Gita Lentera*, 2024.
- Syafiii. M, Raina Linda Sari, dkk. "Dinamika Ekonomi Industri: Strategi, Inovasi dan Persaingan Era Modern" *Medan: Unsu Press*, 2024.
- Mansur. Rosichin, Siti Ma'rufah, dkk. "Dimensi Sosiologi Perspektif Pendidikan Islam" *Surabaya: Pena Cendekia*. 2024.
- Rinaldi. "Polarisasi dan Pembentukan Opini Publik di Media Sosial Selama PILKADA Sumatera Barat 2024" *Jurnal of Communication*. Vol. 5., No. 2, 2024.
- Riyadi. Imam. "Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia" *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2., No. 3, 2024.
- Widjonarko. Gugus "Analisis Implementasi Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Swasta Melalui Strategi Diferensiasi Berkelanjutan di Tengah Arus Ekspansi Global" *Jurnal EKSEKUTIF*. Vol. 21., No. 2, 2024.
- Wilda. Almas Pradnya Meganda. "Pengaruh Pendekatan Berbasis Proyek, Masalah dan Stem dalam Rencana Pembelajaran PAI Diferensiasi Terhadap Pemahaman Budaya dan Lingkungan Siswa" *Al-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 02., No. 02, 2024.
- Ismail. Lukman, Yulfa Lumba, dkk. "Meretas Jalan Damai: Pandangan Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Agama" *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 4., No. 2, 2024.
- Handayani. Sri Rahmani, Aisha Eliana Putri, dkk. "Membangun Kesadaran Berbahasa

Memahami Sejarah Bahasa Indonesia dan Kemunculan Bahasa Gaul di Era Globalisasi” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)*. Vol. 3., No. 2, 2024.

Hodriani, Yakobos Ndonga, dkk. “Pengantar Sosiologi dan Antropologi” Jakarta: Kencana, 2023.

Hilmin. “Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi Dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam” *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1., No. 3, 2023.

Debora. Artha Silalahi. “Rekonstruksi Pengawasan DPR RI dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan melalui Kerangka Demokrasi Konstitusional” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. Vol. 3., No. 2, 2023.

Indrawan, Jerry. “Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol. 4., No. 1, 2022.

Zulfaadli. “Review Buku Konservatisme Islam: Politik Identitas dan Kelompok Islamis di Indonesia” *Jurnal Pendidikan Politik*. Vol. 19., No. 2, 2022.

Ul. Diya Akmal dan Dea Linta Arlianti. “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warfa Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang – undang di Mahkamah Konstitusi” *Mulawarman Law Review*. Vol. 7., No. 1, 2022.

Nurjaman. “Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan

Undang – undang No. 40 Tahun 2008” Vol. 2., No. 2, 2021.

Dian. Heru Setiawan dan M. Dimyanti Sudja. “Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan di Indonesia” *Ilmu dan Budaya*. Vol. 42., No.2, 2021.